WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan kebijakan anggaran yang strategis sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi pada tercapainya program dan kegiatan yang telah direncanakan;

b. bahwa untuk mendukung kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan kedua pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 12 April 2021
WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 12

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Lampiran I Pergeseran II Penjabaran APBD TA 2021
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 12 April 2021

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.025.548.383.850,00	1.008.389.914.850,00	(17.158.469.000,00)	(1,67)	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	242.587.905.850,00	242.587.905.850,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01	**Pajak Daerah**	79.066.000.000,00	79.066.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 06	Pajak Hotel	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 06 . 01	Pajak Hotel	9.766.000.000,00	9.766.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 06 . 08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 07	Pajak Restoran	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 07 . 01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 07 . 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 07 . 03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 07 . 07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08 . 01	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08 . 02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08 . 05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08 . 07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08 . 08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08 . 09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09 . 02	Pajak Reklame Kain	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09 . 03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09 . 05	Pajak Reklame Berjalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09 . 09	Pajak Reklame Film/Slide	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 10	Pajak Penerangan Jalan	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 01 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 11	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 11 . 01	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 12	Pajak Air Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 12 . 01	Pajak Air Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14 . 04	Pajak Batu Kapur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14 . 23	Pajak Pasir dan Kerikil	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 14 . 37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 15 . 01	PBBP2	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 16 . 01	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 16 . 02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02	**Retribusi Daerah**	37.293.650.000,00	37.293.650.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01	Retribusi Jasa Umum	30.172.000.000,00	30.172.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.950.000.000,00	20.950.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.025.000.000,00	4.025.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.592.150.000,00	1.592.150.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	578.100.000,00	578.100.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 04	Retribusi Terminal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	124.050.000,00	124.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 02 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.529.500.000,00	5.529.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.529.500.000,00	5.529.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03 . 01 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04	**Lain-lain PAD yang Sah**	121.728.255.850,00	121.728.255.850,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 05	Jasa Giro	3.581.590.000,00	3.581.590.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 05 . 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.579.590.000,00	3.579.590.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 05 . 02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 05 . 05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.665.000.000,00	2.665.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 08 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.665.000.000,00	2.665.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 11 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 13 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 16	Pendapatan BLUD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 16 . 01	Pendapatan BLUD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.977.265.850,00	9.977.265.850,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 18 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.977.265.850,00	9.977.265.850,00	0,00	0,00	
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	750.208.078.000,00	733.049.609.000,00	(17.158.469.000,00)	(2,29)	
4 . 2 . 01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	702.708.058.000,00	685.549.589.000,00	(17.158.469.000,00)	(2,44)	
4 . 2 . 01 . 01	Dana Perimbangan	653.727.190.000,00	636.568.721.000,00	(17.158.469.000,00)	(2,62)	
4 . 2 . 01 . 01 . 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.546.787.000,00	13.546.787.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 01 . 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	497.821.062.000,00	481.877.171.000,00	(15.943.891.000,00)	(3,20)	
4 . 2 . 01 . 01 . 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.953.087.000,00	64.738.509.000,00	(1.214.578.000,00)	(1,84)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 01 . 01 . 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	76.406.254.000,00	76.406.254.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 02	Dana Insentif Daerah (DID)	48.980.868.000,00	48.980.868.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 02 . 01	DID	48.980.868.000,00	48.980.868.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	47.500.020.000,00	47.500.020.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	47.500.020.000,00	47.500.020.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 02 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.500.020.000,00	47.500.020.000,00	0,00	0,00	
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	32.752.400.000,00	32.752.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 01	**Pendapatan Hibah**	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 01 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	26.752.400.000,00	26.752.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 03 . 01	Lain-lain Pendapatan	26.752.400.000,00	26.752.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 03 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	26.752.400.000,00	26.752.400.000,00	0,00	0,00	
5	**BELANJA DAERAH**	1.336.726.307.479,00	1.319.567.838.479,00	(17.158.469.000,00)	(1,28)	
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	945.695.761.299,00	944.067.523.378,00	(1.628.237.921,00)	(0,17)	
5 . 1 . 01	**Belanja Pegawai**	457.577.725.768,00	457.394.662.910,00	(183.062.858,00)	(0,04)	
5 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	297.465.344.789,42	297.465.337.156,00	(7.633,42)	0,00	
5 . 1 . 01 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	227.351.163.899,00	226.895.814.867,00	(455.349.032,00)	(0,20)	
5 . 1 . 01 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.331.846.323,00	19.459.314.209,00	127.467.886,00	0,66	
5 . 1 . 01 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.982.262.619,00	8.051.280.869,00	69.018.250,00	0,86	
5 . 1 . 01 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.116.944.716,00	14.926.853.094,00	(190.091.622,00)	(1,26)	
5 . 1 . 01 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.786.162.308,00	3.122.489.012,00	336.326.704,00	12,07	
5 . 1 . 01 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.466.641.435,00	11.541.154.839,00	74.513.404,00	0,65	
5 . 1 . 01 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	551.782.860,00	557.231.760,00	5.448.900,00	0,99	
5 . 1 . 01 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	158.731.058,42	158.790.789,00	59.730,58	0,04	
5 . 1 . 01 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.307.062.207,00	10.335.920.057,00	28.857.850,00	0,28	
5 . 1 . 01 . 01 . 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	543.202.699,00	542.713.245,00	(489.454,00)	(0,09)	
5 . 1 . 01 . 01 . 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.848.086.501,00	1.852.316.251,00	4.229.750,00	0,23	
5 . 1 . 01 . 01 . 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.458.164,00	21.458.164,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 01 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	70.550.363.929,58	70.543.463.930,00	(6.899.999,58)	(0,01)	
5 . 1 . 01 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	65.922.335.774,58	4.897.593.554,00	(61.024.742.220,58)	(92,57)	
5 . 1 . 01 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	969.336.676,00	72.037.022,00	(897.299.654,00)	(92,57)	
5 . 1 . 01 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.658.691.479,00	65.573.833.354,00	61.915.141.875,00	1.692,28	
5 . 1 . 01 . 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.773.840.746,00	64.630.810.871,00	(143.029.875,00)	(0,22)	
5 . 1 . 01 . 03 . 01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 03 . 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	250.000.000,00	126.638.125,00	(123.361.875,00)	(49,34)	
5 . 1 . 01 . 03 . 03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	59.608.511.320,00	59.608.511.320,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 03 . 05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 03 . 07	Belanja Honorarium	2.404.329.426,00	2.376.361.426,00	(27.968.000,00)	(1,16)	
5 . 1 . 01 . 03 . 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	329.000.000,00	337.300.000,00	8.300.000,00	2,52	
5 . 1 . 01 . 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.141.604.030,00	14.141.604.030,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 01	Belanja Uang Representasi DPRD	780.852.428,00	660.502.428,00	(120.350.000,00)	(15,41)	
5 . 1 . 01 . 04 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	56.234.949,00	56.234.949,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.943.840,00	68.943.840,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 04	Belanja Uang Paket DPRD	62.354.338,00	62.354.338,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	835.903.250,00	835.903.250,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.715.467,00	111.715.467,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	46.153.636,00	46.153.636,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.412.500.000,00	3.162.500.000,00	(250.000.000,00)	(7,33)	
5 . 1 . 01 . 04 . 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.069.850.415,00	1.069.850.415,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	11.724,00	361.724,00	350.000,00	2.985,33	
5 . 1 . 01 . 04 . 12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.947.083.983,00	4.366.283.983,00	419.200.000,00	10,62	
5 . 1 . 01 . 04 . 13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.750.000.000,00	3.700.800.000,00	(49.200.000,00)	(1,31)	
5 . 1 . 01 . 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	650.766.844,00	617.641.494,00	(33.125.350,00)	(5,09)	
5 . 1 . 01 . 05 . 01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.964.000,00	5.964.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	5.069.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	881.244,00	881.244,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.446.080,00	5.446.080,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 01 . 05 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	393.120,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	60.000.000,00	26.874.650,00	(33.125.350,00)	(55,21)	
5 . 1 . 01 . 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.775.925.579,00	1.775.925.579,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 06 . 01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 06 . 02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.574.325.579,00	1.574.325.579,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 88	Belanja Pegawai BOS	8.011.519.850,00	8.011.519.850,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 88 . 88	Belanja Pegawai BOS	8.011.519.850,00	8.011.519.850,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 99	Belanja Pegawai BLUD	208.360.000,00	208.360.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 99 . 99	Belanja Pegawai BLUD	208.360.000,00	208.360.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02	**Belanja Barang dan Jasa**	469.988.688.832,00	468.483.513.769,00	(1.505.175.063,00)	(0,32)	
5 . 1 . 02 . 01	Belanja Barang	70.784.008.531,64	70.960.186.892,17	176.178.360,53	0,25	
5 . 1 . 02 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.562.090.516,64	70.738.268.877,17	176.178.360,53	0,25	
5 . 1 . 02 . 01 . 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	221.918.015,00	221.918.015,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 02	Belanja Jasa	192.571.373.881,44	186.384.102.651,44	(6.187.271.230,00)	(3,21)	
5 . 1 . 02 . 02 . 01	Belanja Jasa Kantor	142.180.835.557,44	141.495.319.945,44	(685.515.612,00)	(0,48)	
5 . 1 . 02 . 02 . 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.709.211.610,00	16.757.139.373,00	47.927.763,00	0,29	
5 . 1 . 02 . 02 . 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.831.207,00	2.041.573.978,00	(559.257.229,00)	(21,50)	
5 . 1 . 02 . 02 . 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.773.597.325,00	4.456.044.829,00	(317.552.496,00)	(6,65)	
5 . 1 . 02 . 02 . 06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 02 . 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	22.250.000,00	23.650.000,00	1.400.000,00	6,29	
5 . 1 . 02 . 02 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.310.633.792,00	16.451.270.911,00	(3.859.362.881,00)	(19,00)	
5 . 1 . 02 . 02 . 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.452.514.390,00	3.731.116.390,00	(721.398.000,00)	(16,20)	
5 . 1 . 02 . 02 . 13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 02 . 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	190.000.000,00	96.487.225,00	(93.512.775,00)	(49,22)	
5 . 1 . 02 . 03	Belanja Pemeliharaan	45.591.283.323,12	47.776.668.726,39	2.185.385.403,27	4,79	
5 . 1 . 02 . 03 . 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 03 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.884.164.972,12	4.308.370.096,39	424.205.124,27	10,92	
5 . 1 . 02 . 03 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.525.604.873,00	42.289.785.152,00	1.764.180.279,00	4,35	
5 . 1 . 02 . 03 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.181.513.478,00	1.163.513.478,00	(18.000.000,00)	(1,52)	
5 . 1 . 02 . 04	Belana Perjalanan Dinas	51.009.528.363,80	53.696.494.953,00	2.686.966.589,20	5,27	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 02 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.900.324.363,80	53.587.290.953,00	2.686.966.589,20	5,28	
5 . 1 . 02 . 04 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	109.204.000,00	109.204.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.329.665.849,00	7.963.231.663,00	(366.434.186,00)	(4,40)	
5 . 1 . 02 . 05 . 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.118.765.935,00	2.469.784.935,00	351.019.000,00	16,57	
5 . 1 . 02 . 05 . 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.210.899.914,00	5.493.446.728,00	(717.453.186,00)	(11,55)	
5 . 1 . 02 . 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.293.087.556,00	12.293.087.556,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 88 . 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.293.087.556,00	12.293.087.556,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89.409.741.327,00	89.409.741.327,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 99 . 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89.409.741.327,00	89.409.741.327,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05	**Belanja Hibah**	11.750.186.699,00	12.250.186.699,00	500.000.000,00	4,26	
5 . 1 . 05 . 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.716.138.699,00	11.216.138.699,00	500.000.000,00	4,67	
5 . 1 . 05 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.394.186.773,00	4.394.186.773,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.512.500.000,00	4.512.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.789.619.918,00	2.289.619.918,00	500.000.000,00	27,94	
5 . 1 . 05 . 05 . 04	Belanja Hibah kepada Koperasi	19.832.008,00	19.832.008,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 06	Belanja Hibah Dana BOS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 06 . 01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	834.048.000,00	834.048.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 07 . 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	834.048.000,00	834.048.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06	**Belanja Bantuan Sosial**	6.379.160.000,00	5.939.160.000,00	(440.000.000,00)	(6,90)	
5 . 1 . 06 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.914.160.000,00	5.914.160.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.914.160.000,00	5.914.160.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 06 . 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	440.000.000,00	0,00	(440.000.000,00)	(100,00)	
5 . 1 . 06 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	440.000.000,00	0,00	(440.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2	**BELANJA MODAL**	387.543.546.180,00	372.013.315.101,00	(15.530.231.079,00)	(4,01)	
5 . 2 . 01	**Belanja Modal Tanah**	75.986.756.860,00	70.483.633.322,00	(5.503.123.538,00)	(7,24)	
5 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah	75.986.756.860,00	70.483.633.322,00	(5.503.123.538,00)	(7,24)	
5 . 2 . 01 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah Persil	73.365.307.131,00	68.692.996.361,00	(4.672.310.770,00)	(6,37)	
5 . 2 . 01 . 01 . 02	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.621.449.729,00	1.790.636.961,00	(830.812.768,00)	(31,69)	
5 . 2 . 02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	91.047.994.746,00	85.529.307.549,00	(5.518.687.197,00)	(6,06)	
5 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Besar	4.200.739.032,00	3.076.645.940,00	(1.124.093.092,00)	(26,76)	
5 . 2 . 02 . 01 . 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.576.218.182,00	1.576.645.940,00	427.758,00	0,03	
5 . 2 . 02 . 01 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	2.624.520.850,00	1.500.000.000,00	(1.124.520.850,00)	(42,85)	
5 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.191.646.075,00	7.799.858.909,00	(391.787.166,00)	(4,78)	
5 . 2 . 02 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.191.646.075,00	7.799.858.909,00	(391.787.166,00)	(4,78)	
5 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	205.601.982,00	205.601.982,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	74.712.070,00	74.712.070,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	511.413,00	511.413,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 03	Belanja Modal Alat Ukur	130.378.499,00	130.378.499,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Alat Pertanian	44.162.264,00	125.026.814,00	80.864.550,00	183,11	
5 . 2 . 02 . 04 . 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	44.162.264,00	125.026.814,00	80.864.550,00	183,11	
5 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.450.456.914,00	23.196.517.644,00	(253.939.270,00)	(1,08)	
5 . 2 . 02 . 05 . 01	Belanja Modal Alat Kantor	17.793.614.224,00	17.890.376.203,00	96.761.979,00	0,54	
5 . 2 . 02 . 05 . 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.356.216.595,00	5.036.462.074,00	(319.754.521,00)	(5,97)	
5 . 2 . 02 . 05 . 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.626.095,00	269.679.367,00	(30.946.728,00)	(10,29)	
5 . 2 . 02 . 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	717.338.899,00	639.576.547,00	(77.762.352,00)	(10,84)	
5 . 2 . 02 . 06 . 01	Belanja Modal Alat Studio	657.478.601,00	579.716.249,00	(77.762.352,00)	(11,83)	
5 . 2 . 02 . 06 . 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	59.860.298,00	59.860.298,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	49.474.674.558,00	45.407.069.817,00	(4.067.604.741,00)	(8,22)	
5 . 2 . 02 . 07 . 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	49.180.515.825,00	45.402.069.817,00	(3.778.446.008,00)	(7,68)	
5 . 2 . 02 . 07 . 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	294.158.733,00	5.000.000,00	(289.158.733,00)	(98,30)	
5 . 2 . 02 . 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	183.705.371,00	528.705.371,00	345.000.000,00	187,80	
5 . 2 . 02 . 08 . 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 02 . 08 . 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	110.686,00	110.686,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 08 . 04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	115.497.600,00	115.497.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 08 . 05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.197.085,00	1.197.085,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 08 . 08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 08 . 09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 10	Belanja Modal Komputer	4.209.885.516,00	4.303.240.265,00	93.354.749,00	2,22	
5 . 2 . 02 . 10 . 01	Belanja Modal Komputer Unit	3.077.328.189,00	3.150.441.807,00	73.113.618,00	2,38	
5 . 2 . 02 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.132.557.327,00	1.152.798.458,00	20.241.131,00	1,79	
5 . 2 . 02 . 12	Belanja Modal Alat Pengeboran	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 12 . 02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	182.949.135,00	60.229.260,00	(122.719.875,00)	(67,08)	
5 . 2 . 02 . 18 . 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	182.949.135,00	60.229.260,00	(122.719.875,00)	(67,08)	
5 . 2 . 02 . 19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	112.863.931.922,00	109.638.666.208,00	(3.225.265.714,00)	(2,86)	
5 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	112.463.931.922,00	109.238.666.208,00	(3.225.265.714,00)	(2,87)	
5 . 2 . 03 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.463.931.922,00	109.238.666.208,00	(3.225.265.714,00)	(2,87)	
5 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 03 . 04 . 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	104.572.793.406,00	103.289.638.776,00	(1.283.154.630,00)	(1,23)	
5 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	74.250.913.259,00	74.120.094.308,00	(130.818.951,00)	(0,18)	
5 . 2 . 04 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan	74.250.913.259,00	74.120.094.308,00	(130.818.951,00)	(0,18)	
5 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Bangunan Air	26.758.193.280,00	25.605.681.518,00	(1.152.511.762,00)	(4,31)	
5 . 2 . 04 . 02 . 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.572.975.742,00	1.460.463.980,00	(1.112.511.762,00)	(43,24)	
5 . 2 . 04 . 02 . 06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	23.594.217.538,00	23.594.217.538,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 02 . 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	591.000.000,00	551.000.000,00	(40.000.000,00)	(6,77)	
5 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Instalasi	3.563.686.867,00	3.563.862.950,00	176.083,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 03 . 01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	14.562.950,00	14.562.950,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 03 . 02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.549.123.917,00	3.549.300.000,00	176.083,00	0,00	
5 . 2 . 05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	3.072.069.246,00	3.072.069.246,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.682.904.350,00	2.682.904.350,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 01 . 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.682.904.350,00	2.682.904.350,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	31.954.336,00	31.954.336,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 02 . 01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	31.954.336,00	31.954.336,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	167.507.500,00	167.507.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 07 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	167.507.500,00	167.507.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	189.703.060,00	189.703.060,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 08 . 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	189.703.060,00	189.703.060,00	0,00	0,00	
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	3.487.000.000,00	3.487.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 3 . 01	**Belanja Tidak Terduga**	3.487.000.000,00	3.487.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 3 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	3.487.000.000,00	3.487.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 3 . 01 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	3.487.000.000,00	3.487.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(311.177.923.629,00)	(311.177.923.629,00)	0,00	0,00	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	323.668.370.146,00	323.668.370.146,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	29.115.921.428,00	29.115.921.428,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 01 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 01 . 03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	25.415.921.428,00	25.415.921.428,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 02 . 01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	25.415.921.428,00	25.415.921.428,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 08	Sisa Belanja Lainnya	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 08 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 04	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	294.552.448.718,00	294.552.448.718,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 04 . 04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	294.552.448.718,00	294.552.448.718,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 1 . 04 . 04 . 02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	294.552.448.718,00	294.552.448.718,00	0,00	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	12.490.446.517,00	12.490.446.517,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 02	**Penyertaan Modal Daerah**	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 02 . 02 . 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 03	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	3.490.446.517,00	3.490.446.517,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 03 . 01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	3.490.446.517,00	3.490.446.517,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 03 . 01 . 01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	3.490.446.517,00	3.490.446.517,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	311.177.923.629,00	311.177.923.629,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

KOTA GORONTALO, 12 April 2021

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Printed By SimDa